

▶ SAHAM EMITEN MENGUAT



Bisnis/Endang Muchtar

Karyawan memantau pergerakan harga saham di salah satu perusahaan sekuritas di Jakarta, belum lama ini. PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. membukukan penguatan harga saham paling signifikan pada perdagangan Senin (10/9). Saham emiten berkode RBMS tersebut memimpin penguatan saham (*top gainers*) setelah ditutup melesat 34,29% di level Rp141 per lembar saham.

▶ KINERJA EMITEN

Penjualan Lahan DMAS Laris Manis

JAKARTA — Pengembang kawasan industri terpadu Kota Deltamas, PT Puradelta Lestari Tbk., mencatatkan *marketing sales* lahan industri seluas 21,7 hektare sepanjang Januari—Juni 2018, capaian tertinggi di pangsa pasar penjualan lahan industri.

Emiten dengan kode saham DMAS itu memiliki keunggulan kompetitif sebagai kawasan terpadu modern berbasis industri dengan fasilitas dan infrastruktur yang komprehensif.

“Hal ini mengukuhkan kembali posisi DMAS sebagai pemimpin di sektor pengembang kawasan industri dalam beberapa tahun terakhir,” kata Tony Suwanto, Direktur Puradelta Lestari, dalam keterangan resmi, Selasa (11/9).

Pada semester I/2018, DMAS meraih total *marketing sales* senilai Rp561 miliar dari penjualan lahan industri, lahan komersial, maupun produk hunian. Pencapaian itu sekitar 45% dari target *marketing sales* DMAS pada tahun ini senilai Rp1,25 triliun.

DMAS yakin dapat meraih target penjualan tersebut didukung oleh tingginya permintaan yang diterima perseroan hingga mencapai seluas kurang lebih 100 hektare.

Permintaan tinggi berasal dari perusahaan otomotif maupun non-otomotif yang sebagian besar adalah perusahaan asing. Menurut Tony, hal itu mengindikasikan minat investasi asing di dalam negeri masih tinggi.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri dan akselerasi proyek pemerintah, DMAS terus mengembangkan kawasan residensial yang dilengkapi fasilitas pendukung.

Berbagai penyewa komersial ternama, sekolah, rumah sakit, *chain restaurant*, dan SPBU telah berinvestasi, beberapa di antaranya sudah beroperasi di Kota Deltamas.

Pada saat ini dalam proses pembangunan Japanese School dengan kurikulum pendidikan Jepang seiring dengan meningkatnya jumlah ekspatriat Jepang di Kota Deltamas.

“Pengembangan kawasan residensial dan komersial ini penting dilakukan sebagai sinergi pengembangan kawasan industri perseroan sehingga dapat memperkuat posisi kami sebagai pemimpin di sektor pengelolaan kawasan industri.”

DMAS merupakan pengembang dan pengelola Kota Deltamas yang di dalamnya terdapat kawasan industri GIC, salah satu area industri terbesar di Indonesia dengan lahan solid seluas 1.714 hektare.

Secara total, termasuk luas kawasan untuk pengembangan residensial dan komersial, DMAS memiliki lahan seluas 3.177 hektare.

Berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol layang, LRT, kereta cepat, jalan tol Jakarta—Cikampek 2 Selatan, serta pembangunan pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati akan meningkatkan nilai Kota Deltamas sebagai kawasan perkotaan modern berbasis industri.

Dari sisi keuangan, DMAS memiliki kelebihan karena tidak memiliki utang (*zero-debt*). Hingga saat ini, capex berasal dari pendanaan internal yang memadai dengan kas perseroan per semester I/2018 mencapai Rp233,27 miliar. (Emanuel B. Caesario)

▶ RENCANA IPO

Mengawal Startup Melantai di Bursa

Perusahaan rintisan yang didirikan anak bangsa, PT Yolooo Integra Datanet Tbk., segera *listing* di Bursa Efek Indonesia. Pemilik produk rental modem merek Passpod itu diprediksi mengikuti jejak kesuksesan pendahulunya yang sudah terlebih dahulu menjajal bursa saham.

Dara Aziliya
dara.aziliya@bisnis.com

Belakangan, perusahaan rintisan atau *startup* meramaikan perdagangan BEI dengan aksi penawaran saham perdana atau IPO. Langkah sejumlah perusahaan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan signifikan.

Perusahaan rintisan pertama di BEI yaitu PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. melantai pada 5 Oktober 2017. Pada semester I/2018, penjualan emiten dengan sandi KIOS tersebut melonjak 2.575,5% (yoy) dengan laba bersih positif Rp4,76 miliar dari rugi Rp5,88 miliar pada semester I/2017.

Emiten *startup* Grup Kresna menyusul masuk ke bursa sebulan kemudian, PT M Cash Integrasi Tbk. atau MCAS dengan mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 287,5% pada semester I/2018 (yoy) dan lonjakan laba bersih cukup signifikan mencapai 108,7%.

Beranjak pada 2018, per 12 Juli, entitas anak MCAS yaitu PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) ikut unjuk gigi

masuk bursa saham. Penjualan semester I/2018 melonjak 1.475,5% (yoy), sedangkan laba bersih mencapai Rp2,54 miliar setelah pada semester I/2017 membukukan rugi Rp70,3 miliar.

Manajemen BEI memacu perusahaan rintisan yang serius berminat IPO melalui sejumlah program seperti IDX Incubator dan Go Start Up Indonesia.

Otoritas pasar modal secara simultan juga mengevaluasi rangkaian aturan IPO *startup* untuk memudahkan langkah memasuki bursa, misalnya, ketentuan laba usaha, alokasi *freefloat*, dan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK).

“Awalnya kami mewajibkan mereka sudah laba usaha selama 10 tahun, tetapi sekarang boleh laba usaha hanya 6 tahun setelah tercatat pada papan akselerasi,” ungkap Direktur Penilaian Perusahaan BEI, IGD Nyoman Yetna Setia, pada pekan lalu.

BEI pun mengincar *startup* raksasa yang saat ini tumbuh sangat masif seperti GoJek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Pada bulan depan, otoritas pasar modal siap menelurkan perusahaan pertama dari IDX Incubator untuk IPO, yaitu Yolooo Integra Datanet.

KARAKTER BISNIS

Program Director IDX Incubator Irmawati Amran menyampaikan, *startup* Tanah Air memiliki karakter dan diferensiasi yang kuat sehingga mampu menangkap pasar populasi penduduk

Indonesia yang sangat besar.

Dengan infrastruktur yang terus dibangun, sejumlah perusahaan rintisan bisa terbang layaknya KIOS atau MCAS dengan menawarkan bisnis sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Investor tidak perlu takut karena kita bisa lihat bisnisnya, apakah memenuhi kebutuhan atau tidak. Dari laporan keuangannya juga akan tercermin bagaimana mereka mengembangkan *start-up*nya. Secara prinsip, aspek penilaiannya sama dengan perusahaan konvensional.”

Dia berharap, berbagai kebijakan BEI ke depan menumbuhkan perusahaan rintisan baru dan bisa tertarik masuk ke pasar modal untuk opsi pendanaan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebelumnya menyampaikan, Indonesia memiliki banyak perusahaan rintisan yang berpotensi tercatat di BEI. Kendati demikian, belum banyak yang berani mengambil langkah tersebut.

“Dari sisi regulasi, pemerintah sangat mendukung. Sebenarnya kita banyak memiliki perusahaan *startup* yang skalanya sudah cukup besar. Saya harap mereka juga tertarik untuk melantai di bursa,” ungkapnya. Rudiantara mendorong perusahaan rintisan termasuk *unicorn* untuk mempertimbangkan IPO.

Direktur PT Kresna Graha Investama Tbk. Suryandya Jahta menyampaikan, stigma investor untuk perusahaan digital Indonesia belum sepenuhnya positif, meskipun sejumlah perusahaan tumbuh masif. Faktor paling penting untuk perusahaan *startup* digital dapat menarik investor adalah model bisnis yang *sustainable*.

“Investor akan mencari perusahaan yang memiliki *business model* yang siap. *Business model* sangat penting untuk memastikan apakah pertumbuhan perusahaan tersebut bisa eksponensial.”

▶ PENYEDIA JASA HELIKOPTER



Bisnis/Debi Gunawan

Chief Executive Officer Whitesky Aviation Denon Prawiraatmadja (kedua kiri) berbingcang dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Pahala Nugraha Mansury (kedua kanan) di sela-sela penandatanganan kerja sama peningkatan layanan konsumen dalam mendapatkan layanan jasa transportasi yang eksklusif dan terintegrasi di Jakarta, Senin, (10/9). Melalui kerja sama ini, para pengguna jasa Garuda Indonesia dapat menikmati layanan helikopter yang disediakan oleh Whitesky Aviation.

▶ KEBIJAKAN PAJAK IMPOR

MTDL Tunggu Restitusi

JAKARTA — PT Metrodata Electronics Tbk., emiten distribusi, solusi, dan konsultasi teknologi informasi menilai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pajak barang elektronik tidak berdampak besar pada target keuangan perseroan pada tahun ini.

Direktur Independen Metrodata Electronics (MTDL) Randy Kartadinata menyampaikan, pada saat ini perseroan hanya mengimpor sekitar 20% dari total barang yang dipasarkan. MTDL juga telah membayar pajak penghasilan sebesar 7,5%.

“Memang ada beberapa peralatan IT yang dikenai [pajak]. Pajak yang dikenakan pemerintah yaitu PPh 22, merupakan pajak impor yang dapat diperhitungkan sebagai pajak badan usaha sehingga di akhir tahun dapat direstitusi,” ungkapnya, Senin (10/9).

Perseroan hanya perlu membayar tambahan poin untuk setiap barang yang perlu diimpor. Porsi impor MTDL terbilang kecil dibandingkan barang yang didapatkan dari perusahaan pemilik merek atau *principle* di Indonesia.

Pada pekan lalu pemerintah merilis daftar impor barang tertentu yang dikenakan pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 10%, merupakan perubahan atas rancangan Permenkeu No. 34/2017 tentang pemungutan PPh 22 pasal 22.

Kemenkeu merilis 672 daftar impor barang tertentu yang dikenakan pemungutan PPh 22 sebesar 10%. Beberapa barang yang dikenakan yaitu laptop termasuk *notebook* dan *subnotebook*, perangkat telepon dengan *gagang* set tanpa kabel, telepon untuk jaringan seluler dan jaringan tanpa kabel, dan sejumlah alat elektronik lain.

MTDL memiliki enam entitas anak usaha yang bergerak pada berbagai usaha seperti distribusi TIK pada perusahaan dan penjualan produk TIK pada ritel. Salah satu anak usaha perseroan yaitu PT My Icon Technology memasarkan perangkat elektronik seperti *notebook*, *all in one PC*, *printer*, *ponsel pintar*, *tablet*, *speaker*, *headphone*, *mouse*, dan perangkat lainnya.

Karena dapat direstitusi, perseroan tetap mempertahankan belanja modal (*capex*) seperti ketetapan awal dan tidak mengubah target pencapaian laba bersih yang dipatok Rp272,1 miliar pada 2018, tumbuh 10% dari tahun lalu.

(Dara Aziliya)

PENGUMUMAN / PEMBERITAHUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Para Ahli Waris Almarhum Hasan Karno Suhartono sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dalam register Kelurahan Sukahati Nomor : 474.3/20/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan dicatat dalam register Kecamatan Cibinong Nomor : 474.3/01 tanggal 04 Juni 2018, dengan ini memberitahukan kepada seluruh khalayak ramai mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan Surat Kuasa yang pernah ada dan / atau diberikan oleh kami Para Ahli Waris Hasan Karno Suhartono kepada pihak lain untuk mengurus :
 - Tanah Milik Adat Persil D-20 Blok 07 Kota Bekasi seluas + 544.337 M2 yang terletak Kampung Kalimanggis Desa Jatisampurna, Pondok Gede, Bekasi, yang sekarang dikenal dengan nama Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 543 PK/PDT/2013 tanggal 24 Juni 2014 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 257 PK/PDT/2009 tanggal 31 Desember 2009 Jo. Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1320 K/Pdt/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Di Bandung Nomor : 408/PDT/2003/PT.BDG tanggal 7 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 29/PDT.G/2002/PN.BKS tanggal 5 Februari 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde);
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 04/Pdt.P.Cons/2016/ PN. Bks tanggal 21 Desember 2016 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 04 / Pen.Pdt/PBT.P.Cons / 2017 / PN.CBI Jo.No. 04/Pdt.P.Cons/2016/ PN. Bks tanggal 06 Februari 2017

bersama ini kami memberitahukan bahwa kami selaku Para Ahli Waris Almarhum Hasan Karno Suhartono membatalkan Surat Kuasa yang pernah ada dan / atau diberikan kepada pihak lain tersebut;

- Bahwa terhitung sejak tanggal Pengumuman / Pemberitahuan ini dibuat, maka kami selaku Para Ahli Waris Hasan Karno Suhartono membatalkan Surat Kuasa yang pernah ada dan / atau diberikan kepada pihak lain dalam pengurusan Konsinyasi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 04/Pdt.P.Cons/2016/PN. Bks tanggal 21 Desember 2016 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 04 / Pen.Pdt/PBT.P.Cons/ 2017 / PN.CBI Jo. No. 04/Pdt.P.Cons/2016/ PN. Bks tanggal 06 Februari 2017;
- Bahwa Kami Para Ahli Waris Hasan Karno Suhartono telah menunjuk ARIE TRIYONO sesuai dengan Akta Nomor : 04 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Amriyatia Amin Supriyadi, SH., Notaris di Jakarta Selatan Dan kepada LAW OFFICE JS SIMATUPANG & ASSOCIATES bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris Hasan Karno Suhartono mengurus pelaksanaan pencairan yang Konsinyasi sejumlah Rp. 218.893.207.401,- (dua ratus delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu empat ratus satu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 42.669 M2 yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 04/Pdt.P.Cons/2016/PN. Bks tanggal 21 Desember 2016 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 04 / Pen.Pdt/PBT.P.Cons / 2017 / PN.CBI Jo. No. 04/Pdt.P.Cons/2016/PN. Bks tanggal 6 Februari 2017.

Demikian pengumuman/pemberitahuan ini kami buat dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Agustus 2018
Hormat Kami,

PARA AHLI WARIS ALMARHUM HASAN KARNO SUHARTONO
Ny. SAMIH HALIMAH TUSADIYAH GUNTARA

GUNTORO SAKSI II
NASIM ISKANDAR

SAKSI I HARMANTO SAKSI III B. HUSIN



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOODYEAR INDONESIA TBK

Pemegang saham PT. Goodyear Indonesia Tbk, berkedudukan di Kotamadya Bogor dan beralamat di Jalan Pemuda No. 27, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor (“**Perseroan**”) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS**”) pada:

- Hari, Tanggal : Kamis, 4 Oktober 2018
- Tempat : Ruang Rafflesia 1.2 Hotel Santika Bogor, Jalan Raya Padjajaran Botani Square, Bogor
- Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat – selesai
- Mala Acara RUPS : Permohonan persetujuan atas perubahan susunan Direksi terkait dengan pengunduran diri Bapak Marco H. Vlasman dan pengangkatan penggantinya serta pengangkatan seorang anggota Direksi Perseroan yang baru

Penjelasan mala acara:

RUPS diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan pengunduran diri Bapak Marco H. Vlasman dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan pengangkatan Bapak Vikash Pillay sebagai penggantinya serta pengangkatan Bapak Randep Singh Kanwar sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru.

CATATAN:

- Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Bahan terkait dengan mala acara RUPS telah tersedia di Kantor Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 sejak tanggal panggilan ini dan akan disediakan pada waktu penyelenggaraan RUPS
- Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 September 2018, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
- Keputusan yang diumumkan untuk mala acara RUPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk mala acara RUPS harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS
- Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPS diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS. Sedangkan para pemegang saham yang namanya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- (a) Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak dapat hadir dalam RUPS, hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Oleh karena itu, para pemegang saham Perseroan disarankan untuk tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa mereka. Jika surat kuasa dari pemegang saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris setempat dan kemudian dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau Konsulat Indonesia di tempat mana surat kuasa tersebut ditandatangani.
- (b) Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Bima Registra, di Satrio Tower, Lantai 9 Jalan Prof. Dr. Satrio RT.07 / RW.02, Kuningan Tim, Selatubudi, Jakarta Selatan, 12950
- (c) Surat kuasa untuk RUPS yang telah ditandatangani sebagaimana tersebut, harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di Kantor Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161, selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS diadakan, yakni tanggal 1 Oktober 2018.
- Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus Badan Hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam RUPS tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut. Dimohon agar:
 - fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPS diadakan, dan
 - salinan Rilisalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi Pemegang Saham Badan Hukum atau orang lain yang setara yang menjabat pada saat RUPS diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berkenaan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham Yang Berhak diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPS seditinya 20 (dua puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Bogor, 12 September 2018
Direksi Perseroan